

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bantuan Sosial merupakan program pemerintah yang diatur secara langsung dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial tercantum pada pasal 1 ayat 1 bahwa Bantuan Sosial merupakan “bantuan berupa uang, barang atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok, masyarakat miskin, tidak mampu dan atau rentan terhadap resiko sosial”. Sehingga program Bantuan Sosial ini bertujuan secara langsung untuk memberikan bantuan pada kelompok masyarakat tertentu seperti dalam kondisi memiliki resiko sosial guna mempermudah perekonomiannya atau mengembangkan potensi yang dimiliki kelompok masyarakat tersebut dengan diberikan Bantuan Sosial berupa uang tunai maupun berupa bantuan non tunai.

Pemerintah yang memiliki tujuan untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan agar pertumbuhan ekonomi dapat terus meningkat menetapkan 3 (tiga) jalur strategi pembangunan, yaitu Pro-Pertumbuhan (Pro-Growth) yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui investasi dengan meningkatkan kualitas pengeluaran pemerintah dan meningkatkan kualitas konsumsi, Pro-Lapangan Kerja (Pro-Job) yang bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan agar pengangguran dapat menurun sehingga pertumbuhan ekonomi semakin meningkat, serta Pro-Masyarakat Miskin (Pro-Poor) yang bertujuan untuk mengurangi jumlah kemiskinan di masyarakat dengan menyempurnakan sistem perlindungan sosial, meningkatkan pelayanan dasar, dan menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat.

Instrumen utama yang difokuskan oleh pemerintah dalam strategi pro-poor untuk menanggulangi kemiskinan dibagi menjadi 3 (tiga) klaster, dengan Klaster I yang berfokus pada bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, Klaster II yang berfokus pada penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, serta Klaster III yang berbasis pada pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil atau UMKM. Jenis bantuan sosial tersebut akan diberikan berdasarkan data kelompok masyarakat yang diterima oleh pemerintah, sehingga jenis bantuan sosial yang diberikan dapat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok masyarakat tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Pasal 5 Nomor 01 Tahun 2019, pemberian bantuan sosial merupakan suatu upaya untuk meringankan penderitaan, melindungi kondisi fisik dan juga sebagai sarana memberdayakan potensi seseorang. Selain untuk membantu kelompok masyarakat yang tergolong miskin, bantuan sosial ini juga diberikan bagi masyarakat yang dianggap memiliki potensi dan ingin mengembangkan potensinya tersebut

untuk mencapai kesejahteraan. Dengan ini bantuan sosial tidak hanya diberikan pada masyarakat yang memiliki resiko sosial tetapi juga diberikan bagi masyarakat yang memiliki potensi dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kesenjangan ekonomi, juga dikenal sebagai ketimpangan ekonomi, adalah kondisi tidak seimbang yang terjadi di masyarakat yang didasarkan pada faktor ekonomi. Kesenjangan ekonomi regional dapat menghambat pertumbuhan ekonomi nasional dan menimbulkan ketidakadilan sosial dan masalah keuangan. Oleh karena itu, negara memerlukan kebijakan pembangunan nasional yang efektif. mengatasi ketimpangan perekonomian daerah (ningrum e,p 2024). Istilah ini digunakan untuk menggambarkan perbedaan yang signifikan atau ketidakseimbangan yang terjadi antara kelompok atau individu tertentu dalam hal akses, pendapatan, kekayaan, kesempatan, atau hasil ekonomi .

Ketimpangan ekonomi merujuk pada kesenjangan yang signifikan antara kelompok pendapatan tinggi dan rendah dalam sebuah masyarakat atau negara. Faktor penyebab ketimpangan ekonomi sangat beragam dan meliputi perbedaan pendapatan, akses terhadap pendidikan dan pelatihan, kesenjangan akses terhadap sumber daya, serta ketidakmerataan struktur ekonomi menurut (Gunung, E. B., 2023).

Ketimpangan ekonomi atau ketimpangan distribusi pendapatan merupakan fenomena tidak meratanya distribusi pendapatan di suatu negara. Semakin besar proporsi pendapatan yang diterima masyarakat dengan kelompok pendapatan tertinggi terhadap pendapatan yang diterima masyarakat dengan kelompok pendapatan terendah berarti bahwa ketimpangan semakin besar (Mardinsyah, A. A.,2020).

Ketimpangan ekonomi merupakan isu krusial yang terus menjadi tantangan utama di banyak negara berkembang. Ketimpangan ini tercermin dari distribusi pendapatan yang tidak merata, kesenjangan dalam akses pendidikan dan kesehatan, serta perbedaan signifikan dalam kesempatan ekonomi (Zai, S.,2024)

Ketimpangan sosial merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk di dalamnya ketimpangan pendidikan. Ketika anak-anak dari keluarga kurang mampu tidak memiliki akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas, kesempatan mereka untuk meraih potensi penuh mereka terbatas, dan kesenjangan sosial dapat menjadi semakin membesar (sukarma.,I.K,2023) Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi ketimpangan sosial, khususnya di bidang pendidikan, sangat penting dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan.

Ketimpangan sosial-ekonomi merujuk pada disparitas yang signifikan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan di antara individu atau kelompok dalam masyarakat.

Ketimpangan ini dapat terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap layanan dasar. Misalnya, sebagian masyarakat mungkin memiliki akses yang lebih baik ke pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan, sementara yang lain terperangkap dalam siklus kemiskinan yang sulit diputus. Ketimpangan ini seringkali dipicu oleh berbagai faktor, termasuk perbedaan dalam kekayaan, status sosial, kebijakan pemerintah, serta diskriminasi berdasarkan ras, gender, atau latar belakang etnis. Ketimpangan sosial-ekonomi yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kohesi sosial, karena masyarakat yang merasa terpinggirkan cenderung kurang berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi dan sosial (Hababil,.M,.P 2024).

Kesenjangan ekonomi dapat menimbulkan dampak negatif jangka panjang terhadap stabilitas sosial dan politik. Sumber daya ekonomi yang tidak seimbang didistribusikan di masyarakat ini terjadi karena perbedaan besar dalam kemampuan finansial antara kelompok pendapatan tinggi dan rendah (ningrum e,p 2024). Distribusi kekayaan dan kesempatan yang tidak merata dapat menimbulkan ketidakpuasan sosial, yang dapat menimbulkan konflik dan protes sosial. Kesenjangan ini juga mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, karena kelompok marginal cenderung mempunyai suara yang lebih lemah. Oleh karena itu penting bagi pemerintah untuk tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, namun juga menerapkan kebijakan yang menjamin kesetaraan kesempatan dan akses terhadap sumber daya, sehingga membangun masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

Ketimpangan pendapatan merupakan permasalahan yang sangat serius di Indonesia, di mana 10% penduduk terkaya mempunyai pendapatan 29 kali lebih besar dibandingkan 10% penduduk termiskin. Kesenjangan ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk distribusi sumber daya yang tidak merata, terbatasnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas, dan kurangnya kebijakan perlindungan sosial yang komprehensif. Selain itu, ketimpangan pendapatan berdampak besar terhadap masyarakat pedesaan dan kelompok marginal, sehingga memperburuk tingkat kemiskinan secara keseluruhan di negara ini (Sarjito.,A 2023).

Indonesia menghadapi tingkat kemiskinan yang tinggi, dengan sekitar 25 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Kemiskinan menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti terbatasnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, gizi yang tidak memadai, dan berkurangnya kesempatan untuk pengembangan pribadi dan profesional. Selain itu, tingginya angka kemiskinan sering kali berkontribusi terhadap permasalahan sosial, termasuk kejahatan, kerusakan sosial, dan berkurangnya mobilitas ekonomi.

Kemiskinan merupakan permasalahan utama dalam ekonomi yang bersifat multidimensional sehingga harus diberantas dengan serius agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. (Salsabila,.N 2024) mengemukakan bahwa kemiskinan terjadi dikarenakan adanya perbedaan kualitas SDM dalam suatu negara dengan ditantai dari tingkat IPM yang rendah, pasar tidak sempurna dan modal yang minim. Sehingga berdampak pada tingkat produktivitas negara menjadi rendah. Dengan tingkat produktivitas yang rendah akan berdampak juga pada penurunan pendapatan masyarakat sehingga akan berkaitan juga dengan konsumsi, tabungan dan juga investasi masyarakat dikarenakan masyarakat memiliki tingkat pendapatan yang rendah sehingga akan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Permasalahan kemiskinan ini cukup pelik dan harus secepatnya diatasi. Pemerintah telah mengusahakan berbagai cara untuk mengurangi kemiskinan ini, salah satunya adalah dengan bantuan sosial.

Kemiskinan saat ini masih menjadi salah satu isu yang terus berkembang baik ditingkat Nasional maupun Provinsi dan Kabupaten/Kota. Upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera sangat dipengaruhi oleh kondisi kemiskinan di daerah, karena tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi menunjukkan bahwa kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat belum tercapai. Permasalahan kemiskinan menjadi suatu masalah yang sangat sulit untuk diatasi oleh Negara Indonesia.

Pada dasarnya Kemiskinan menjadi salah satu penghambat sulitnya suatu daerah/negara untuk maju. Kemiskinan menyebabkan menurunnya kualitas sumberdaya manusia, akibat ketidak mampuan mengakses pendidikan, kesehatan, nutrisi yang baik yang berimbas pada produktivitas yang melemah. kemiskinan yang tinggi akan menciptakan masyarakat sulit mendapatkan pinjaman, tidak mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka, tingkat pendapatan dan standar hidup rendah berdampak pada buruknya kesehatan, nutrisi dan menurunkan produktivitas.dengan meningkatnya pendapatan penduduk miskin merangsang pertumbuhan produk lokal untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan pengurangan kemiskinan dapat mendorong perluasan perekonomian yang sehat.

Menurut (Amalia.,A.m 2024) permasalahan ketimpangan pendapatan dapat diatasi dengan perubahan struktural dan kebijakan pemerintah. Perubahan struktural merupakan prasyarat untuk meningkatkan pertumbuhan berkelanjutan dan mengatasi permasalahan perekonomian, serta mendukung kelangsungan pembangunan itu sendiri. Sedangkan kebijakan pemerintah mengacu pada serangkaian keputusan yang diambil pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, dalam hal ini mengatasi masalah ketimpangan. Namun beberapa kebijakan

pemerintah seringkali tidak diimbangi dengan prinsip keadilan dan kesetaraan sehingga memicu kesenjangan atau kesenjangan .

Dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan dan peningkatan akses masyarakat terhadap pangan, Pemerintah telah meluncurkan program berbagai bantuan sosial untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, seperti program bantuan harapan (PKH), bantuan sosial tunai (BST), dan program pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PPKK). pemerintah menggunakan berbagai program atau stimulus, Salah satunya adalah Program Bantuan Sosial. Dengan program bantuan sosial ini dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membantu masyarakat menghadapi dampak krisis, memperbaiki perekonomian penduduk penerima bantuan, membantu melindungi kelompok yang lebih beresiko seperti lansia, penyandang disabilitas dan keluarga miskin. Program bantuan sosial merupakan upaya pemerintah untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya mereka yang berada dalam kondisi rentan atau miskin.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang sifatnya selektif. Pusat Penyuluhan Sosial (Tristanto, 2020) mendefinisikan bantuan sosial sebagai program transfer dana atau barang yang dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan dengan mendistribusikan kemakmuran dan melindungi rumah tangga dari perubahan kondisi pendapatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tujuan pemberian bantuan sosial adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi hal-hal yang berkaitan dengan risiko sosial. Tazkia Rangkuti Aulia (2021) menjabarkan tujuan bantuan sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanggulangan bencana.

Didesa Tetehosi Afia Mazingo merupakan salah satu daerah yang mengalami ketimpangan ekonomi yang signifikan . berdasarkan obeservasi, presentase penduduk miskin di Desa Mazingo Tetehosi Afia rata-rata mayoritas pekerjaan adalah petani, yang dimana mayoritas pekerjaan ini mencapai 50% dengan penghasilan rata-rata 1 juta perbulan. Pendapatan Masyarakat didesa mazingo ini tergolong rendah untuk pendapatan perbulannya. berikut adalah tabel data yang nunjukan ketimpangan ekonomi didesa mazingo.

Tabel 1. 1
Ketimpangan Ekonomi

Ketimpangan ekonomi		
Jenis profesi	Rata-rata penghasilan perorang /bulan	Rata-rata profesi
petani	Rp 1,000,000	50%
Perangkat desa	Rp 2.000.000	5%
wiraswasta	Rp 4.000.000	25%
PNS	Rp 4.000.000	10%
Karyawan swasta	Rp 1,500,000	5%
honorar	Rp 400.000	5%
JUMLAH		100%

Sumber: data desa teteheosi afia, mazingo tahun 2025

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti bermaksud melakukan **ANALISIS PROGRAM BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH DALAM MENGURANGI KETIMPANGAN EKONOMI DI DESA TETEHEOSI AFIA MAZINGO**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Desa Tetehehosi Afia Mazingo menghadapi ketimpangan ekonomi yang signifikan antara penduduk yang berada pada kondisi ekonomi lebih tinggi dan yang lebih rendah.
2. Program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah diharapkan dapat mengurangi ketimpangan ekonomi, namun perlu dianalisis apakah program tersebut efektif dan mencapai sasaran yang tepat.
3. Terdapat kemungkinan bahwa tidak seluruh masyarakat di Desa Tetehehosi Afia Mazingo dapat mengakses bantuan sosial dengan mudah.

1.3. Batasan Masalah

Mengingat permasalahan dalam penelitian ini sangat luas, maka peneliti membatasi masalah yaitu:

1. Penelitian ini terbatas pada analisis program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat Desa Tetehehosi Afia Mazingo dalam periode tertentu, tanpa memperhitungkan bantuan sosial lainnya yang mungkin ada di luar program pemerintah pusat atau daerah.
2. Penelitian ini hanya akan menganalisis dampak bantuan sosial terhadap ketimpangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Desa Tetehehosi Afia Mazingo.

1.4. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dilakukan agar pelaksanaan penelitian dapat terarah dan berfokus. Masalah adalah hambatan yang harus di pecahkan untuk mencapai suatu tujuan yang dimaksudkan. Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan program bantuan sosial pemerintah di Desa Tetehehosi Afia, Mazingo?
2. Bagaimana dampak program bantuan sosial terhadap pengurangan ketimpangan ekonomi masyarakat di Desa Tetehehosi Afia, Mazingo?

1.5. Tujuan Penelitian

Agar hal-hal yang hendak dicapai dalam penelitian ini lebih jelas maka peneliti menetapkan tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program bantuan sosial pemerintah di Desa Tetehehosi Afia, Mazingo.
2. Untuk mengetahui dampak program bantuan sosial terhadap pengurangan ketimpangan ekonomi masyarakat di Desa Tetehehosi Afia, Mazingo.

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Kegunaan penelitian ini adalah

1. Manfaat bagi peneliti

Sebagai salah satu dasar persyaratan untuk melakukan penyusunan skripsi sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada jenjang strata satu (S 1) di kampus

Universitas Nias (UNIAS) fakultas keguruan dan ilmu pendidikan dan juga sebagai kesempatan bagi peneliti dalam mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang didapatkan selama duduk di bangku kuliah.

2. Manfaat bagi Universitas Nias (UNIAS)

Sebagai bahan untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan menambah kepustakaan pada Universitas Nias (UNIAS).

3. Manfaat Bagi masyarakat desa

Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai pentingnya partisipasi aktif dalam program bantuan sosial. Hasil penelitian juga dapat memberikan masukan kepada masyarakat tentang cara memanfaatkan bantuan yang ada untuk meningkatkan kondisi ekonomi mereka.

4. Manfaat bagi pemerintah

Penelitian dapat membantu pemerintah dalam memetakan area-area yang membutuhkan perhatian lebih dalam hal distribusi bantuan sosial, sehingga alokasi anggaran dan sumber daya dapat lebih efisien.